



PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA DAN PENGUATAN NASIONALISME

Lanny Koroh¹

Simon Sabon Ola²

Institut Agama Kristen Negeri Kupang¹

Universitas Nusa Cendana²

lannykoroh1717@gmail.com

Abstract

Indonesian language as the identity of the Indonesian people can actually build the character of nationalism. Early Indonesian nationalism was sparked by colonialism as a common enemy. The originator of Indonesian nationalism today is a shared identity. Indonesian language is one of those shared identities, alongside the flag, the state emblem and the national anthem. To strengthen the role of Indonesian in strengthening nationalism, it is necessary to have an output-oriented Indonesian language education that has a nationalist character, patriotism, and a sense of responsibility for the life of the Indonesian language. Indonesian language education must be able to reduce the pragmatism of the view on the importance of Indonesian language, minimize the deviation from regulation on Indonesian language, and foster the principle of learning Indonesian to achieve Indonesian language in a global context.

Key words: education, Indonesian language, nationalism, pragmatism.

Abstrak

Bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa Indonesia sebenarnya dapat membangun karakter nasionalisme. Nasionalisme Indonesia awal dipicu oleh kolonialisme sebagai musuh bersama. Pencetus nasionalisme Indonesia saat ini adalah identitas bersama. Bahasa Indonesia adalah salah satu identitas bersama, di samping bendera, lambang negara dan lagu kebangsaan. Untuk memperkuat peran Indonesia dalam memperkuat nasionalisme, maka perlu ada pendidikan bahasa Indonesia yang berorientasi pada hasil yang memiliki karakter nasionalis, patriotisme, dan rasa tanggung jawab atas kehidupan bahasa Indonesia. Pendidikan bahasa Indonesia harus mampu mengurangi pragmatisme pandangan tentang pentingnya bahasa Indonesia, meminimalkan penyimpangan dari regulasi bahasa Indonesia, dan menumbuhkan prinsip belajar bahasa Indonesia untuk mencapai bahasa Indonesia dalam konteks global.

Kata kunci: pendidikan, bahasa Indonesia, nasionalisme, pragmatisme.



PENDAHULUAN

Setiap bangsa ataupun suku bangsa memiliki sejumlah pemarkah, baik verbal maupun nonverbal. Pemarkah bahasa menjadi anasir terpenting di tengah menggeliatnya dominasi bahasa-bahasa tertentu di dalam interaksi antarbangsa ataupun antarsuku bangsa. Dominasi bahasa-bahasa tertentu dimaksud tidak hanya disebabkan oleh faktor internal bahasa, misalnya kerumitan struktur dan leksikonnya, tetapi juga oleh faktor eksternal bahasa. Bahkan faktor eksternal ini lebih dominan sebagai konsekuensi logis dari menyusutnya kesadaran pemilik atas kedudukan dan fungsi bahasanya.

Bahasa Indonesia yang kedudukan dan fungsinya dirumuskan secara rinci ternyata tidak cukup bermakna sebagai pemarkah keindonesiaan pemiliknya. Upaya peningkatan gengsi bahasa Indonesia terkendala oleh kebijakan bahasa dengan aplikanya yang terdistorsi. Kondisi ini menyebabkan progres peningkatan gengsi bahasa Indonesia menjadi bahasa yang bermartabat di lingkup global masih belum terwujud. Fakta peran bahasa Indonesia secara diglosik masih berada di bawah gengsi sejumlah bahasa asing telah berkontribusi bagi distorsi aplikasi kebijakan bahasa. Di samping itu, rumusan kaidah yang dihasilkan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sering membuat penuturnya kerepotan karena dua hal: (1) adopsi dan adaptasi leksikon bahasa lokal yang tidak populer menjadi leksikon bahasa Indonesia tanpa penyebarluasan secara masif dan menyeluruh (bdk. Amanriza, 2001:158—1590; (2) kodifikasi (perumusan kaidah) dalam setiap Kongres Bahasa Indonesia yang penyebarluasannya cenderung bersifat parsial. Jika penuturnya sendiri tidak mantap dalam hal penguasaan dan penggunaan bahasa, bagaimana mungkin mereka bisa memiliki sikap positif dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu sendi nasionalisme?

Konstruksi berpikir warga Negara Indonesia yang mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan terasa semakin melemah. Nasionalisme menguat saat suatu bangsa berhadapan dengan musuh yang sama, yakni penjajahan. Dalam kondisi ini, semua perbedaan diabaikan dan tumbuh euforia untuk bersatu. Indonesia yang terbentuk sebagai Negara-Bangsa (*Nation-State*) melahirkan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Esensi dari sebuah Negara-Bangsa ialah adanya simbol-simbol pemersatu, sekaligus sebagai identitas yang di baliknya terselubung kebanggaan sebagai bangsa. Simbol dan identitas dimaksud telah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, yang tertuang juga di dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Amandemennya, pasal 35, 36, 36A, dan 36B.

Bagaimanakah posisi bahasa Indonesia dalam deretan simbol-simbol itu secara empirik? Sangat jauh panggang dari api. Atas dasar itulah, pada kesempatan merayakan Bulan Bahasa Tahun 2018 ini, kita patut bermetanoya untuk selanjutnya bertekad meningkatkan gengsi dan martabat bahasa Indonesia. Penggunaannya harus menjadi kebanggaan setiap warga Negara Indonesia sehingga layak menjadi sendi nasionalisme, seperti halnya kita bangga memiliki lambang negara berupa Burung Garuda, Lagu Indonesia Raya, dan Sang Merah putih.

Dari aras kebijakan bahasa, gengsi, martabat, dan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia seperti yang kita saksikan saat ini. Kebanggaan masih pada tingkat retorika dan atau wacana. Pendidikan bahasa Indonesia perlu diperkuat agar pendidikan menjadi instrumen andal bagi menguatnya nasionalisme anak bangsa.



BAHASA, PENDIDIKAN BAHASA, NASIONALISME

Bahasa

Apa itu bahasa? Tanpa berpikir panjang, setiap orang yang diperhadapkan dengan pertanyaan tersebut akan menjawab, *Bahasa adalah alat komunikasi*. Jika demikian jawabannya, maka pengertian bahasa didiskripsikan berdasarkan kesadaran manusia terhadap fungsi bahasa dimaksud. Ibarat orang bertanya, *Mengapa Anda makan?* jawabannya, *Supaya hidup*. Ini sebuah perspektif, suatu sisi pandang yang sering menjebak untuk kita keluar dari esensi dan hakikat. Jika jawaban *Saya makan untuk hidup*, kemudian disusun balik menjadi *Saya hidup untuk makan*, maksudnya menjadi berbeda pula. Pertanyaan dan jawaban soal hakikat dapat pula dianalogikan dengan perdebatan tentang ayam dan telur, manakah yang lebih dahulu ada. Atau analogi lain, manakah yang lebih dahulu ada, bahasa ataukah berpikir?

Ilustrasi tersebut dimaksudkan untuk membingkai pemikiran kita pada perspektif yang lebih komprehensif agar dapat mencerna hakikat bahasa. Fakta menunjukkan bahwa analisis struktur bahasa saja tidak pernah memuaskan ahlinya sendiri sehingga mereka harus “angkat tangan” dan bersandar pada pragmatik. Demikian pula, analisis tipologi yang disandingkan dengan kesemestaan bahasa sering membuat ahlinya melirik pandangan dunia penuturnya, yang kemudian melahirkan, antara lain: linguistik antropologi, antropologi linguistik, entolinguistik, linguistik kultural, ekolinguistik, bahkan linguistik forensik.

Pengertian bahasa diberikan bukan hanya dari struktur dan fungsinya semata. Itulah sebabnya, Bolinger (1975:1—35) harus merinci penjelasan tentang apa itu bahasa dengan *Some Traits of Language*, yakni: (1) bersifat manusiawi; (2) sebagai tingkah laku; (3) medianya berupa bunyi; (4) memiliki hierarki; (5) berubah; (6) berkaitan dengan sikap; (7) bersifat arbitrer; (8) terstruktur; (9) bersifat vertikal dan horizontal; dan (10) didengar dan diucapkan (lihat juga Sabon Ola, 2012:4—11; bdk. Brown, 2008:6). Pencermatan terhadap hakikat bahasa ini sangat diperlukan untuk merumuskan metode dan pendekatan pendidikan bahasa Indonesia yang tepat. Luarannya ialah penguasaan dan penggunaan bahasa Indonesia dapat meningkatkan nasionalisme.

Pendidikan Bahasa

Istilah pendidikan dan pengajaran berbeda substansinya, sebagaimana tersirat pada bentuk dasarnya *didik* dan *ajar*. Mendidik lebih menekankan pada kompetensi afektif (sikap dan nilai), sedangkan mengajar lebih menekankan kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Meskipun demikian perbedaannya, idealnya proses mendidik harus ditunjang pula oleh proses mengajar, demikian pula proses mengajar semestinya dilengkapi dengan proses mendidik. Dengan alasan demikian, ada kecenderungan untuk menggunakan kedua-duanya, *pendidikan dan pengajaran*.

Pendidikan (yang di dalamnya termasuk pula pengajaran) bahasa Indonesia adalah proses membelajarkan anak tentang kaidah bahasa Indonesia, kaidah penggunaannya dalam berbagai ragam dan ranah, dan sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Dari cakupan isi pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia dalam konteks Taksonomi Bloom ini, sangat diperlukan dukungan kebijakan agar tidak terjadi benturan orientasi sehingga aspek yang satu menjadi lebih dominan atau diutamakan daripada aspek lainnya.

Brown dalam bukunya berjudul *Prinsip Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa* (2008) mengajukan sejumlah pertanyaan tentang pemerolehan bahasa kedua (*second language acquisition*), yang maksudnya sama dengan pembelajaran bahasa. Pertanyaan dimaksud



mencakup: (1) karakteristik pembelajar; (2) faktor linguistik; (3) proses pembelajaran; (4) usia dan pemerolehan; (5) variabel instruksional; (6) konteks; dan (7) tujuan. Ketujuh pertanyaan (pokok) ini dijabarkan lagi oleh Brown menjadi sejumlah pertanyaan spesifik yang menunjukkan bahwa proses pendidikan dan pengajaran bahasa tidak sesederhana seperti yang kita terapkan dalam berbagai kurikulum yang pernah ataupun yang sedang berlaku saat ini. Oleh sebab itu, sangat diperlukan inovasi paradigma pendidikan dan pengajaran bahasa agar luarannya tidak hanya bermakna bagi pengembangan intelektual, tetapi penguatan karakter kebangsaan atau nasionalisme.

Nasionalisme

Nasionalisme itu konsep, nasionalisme itu abstrak, nasionalisme itu karakter, nasionalisme itu rumit dalam mengimplementasikannya karena ada dalam pikiran seseorang, meskipun merupakan kesadaran kolektif. Berasal dari kata *natio* (Latin) yang berarti 'bangsa', kata nasionalisme merujuk pada rasa memiliki warga negara terhadap bangsanya. Rasa memiliki merupakan muatan mental-psikologis yang merefleksikan hubungan timbal balik antara warga negara dengan negaranya.

Dalam teori Negara yang lahir dari sejarah pembentukan negara mana pun di dunia ini, nasionalisme tidak tumbuh begitu saja tanpa pencetus. Nasionalisme tumbuh karena penindasan, ketidakadilan, dan penjajahan. Perkembangan kemudian, hegemoni negara/bangsa tertentu dalam bidang ekonomi, politik (misalnya invasi), bahkan hegemoni budaya merupakan faktor pencetus lahirnya nasionalisme. Dalam konteks ini, nasionalisme terefleksi pada kuatnya daya rekat (kohesi) sosial, adanya penegasian terhadap perbedaan-perbedaan secara kultural, dan menonjolnya pandangan dan perilaku humanis.

Dalam konteks dinamika, nasionalisme tidak pernah tidak berubah. Nasionalisme pun dapat mengendur ketika cita-cita bersama sudah tercapai, dan dalam keadaan normal, cita-cita individu dan kelompok di dalam negara akan muncul sebagai ancaman terhadap nasionalisme. Menghadapi kondisi demikian, yang harus ditonjolkan ialah **identitas bersama**, di samping faktor keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bersama. Identitas bersama dalam berbagai perbedaan seperti di Indonesia memerlukan perawatan yang sungguh-sungguh. Salah satu bentuk perawatan identitas bersama itu ialah digagaskannya pendidikan karakter bagi setiap WNI.

Tiga karakter penting terkait dengan perawatan identitas bersama yang ditemukan dalam 'daftar karakter keindonesiaan', ialah nasionalisme, cinta tanah air, dan tanggung jawab. Negara Indonesia akan berdiri kokoh, maju setara dengan bangsa lain, dan disegani bangsa lain karena identitas bersama yang dimilikinya terus mengalami peraan dan penguatan. Bahasa Indonesia merupakan salah satu dari identitas bersama itu. Perawatannya merupakan perwujudan nasionalisme dan cinta tanah air, serta merupakan tanggung jawab setiap WNI.

BAHASA INDONESIA DAN NASIONALISME

Subjudul ini telah menjadi perbincangan masyarakat Indonesia pada berbagai tingkatan sosial. Sekilas diperoleh kesan bahwa bahasa Indonesia dan nasionalisme penuturnya merupakan dua variabel yang berbanding lurus; semakin setia menggunakan bahasa Indonesia pada ranah yang tipikal terhadapnya, semakin kuat kuat nasionalisme. Proposisi ini menjadi kurang bertenaga ketika kita mencermati realita kehidupan bahasa Indonesia dalam berbagai sektor kehidupan. Hal ini disebabkan oleh pragmatisme pandangan tentang (dan terhadap) bahasa Indonesia.



Pandangan pragmatis merupakan indikasi melemahnya semangat nasionalisme. Hal ini juga menunjukkan ketidaksearahkan gerak langkah di dalam merawat bahasa Indonesia sebagai identitas bersama. Berita yang dilansir *Kompas.com* tentang alasan yang sangat pragmatis bagi Menteri Tenaga Kerja menghilangkan syarat berbahasa Indonesia bagi pekerja asing:

“Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dakhiri menegaskan, penghapusan syarat bisa berbahasa (Indonesia, *tambahan oleh penulis*) bagi tenaga kerja asing (TKA) supaya investasi tidak terhambat. Selama ini, banyak perusahaan yang mengeluh mengenai syarat tersebut, sehingga urung berinvestasi di Indonesia. Apalagi, menurut Hanif dalam kondisi pelemahan ekonomi saat ini sangat sulit menarik investor masuk ke Indonesia. *Kita harus menciptakan iklim bisnis yang sejuk*, kata Hanif”.

Kita hanya bisa mengatakan bahwa ini bukan sebuah keajaiban, melainkan sebuah kelalaian, bahkan keanehan ketika TKI yang akan luar negeri diwajibkan menggunakan bahasa pengantar yang digunakan di Negara tujuan. Jika kewajiban berbahasa Indonesia diterapkan bagi TKA, maka akan ada tambahan pemakai bahasa Indonesia sebanyak jumlah TKA di Indonesia, yakni: China sebanyak 13.034 orang di tahun 2015. Disusul TKA asal Jepang sebanyak 10.128 orang, Korea Selatan sebanyak 5.384 orang, dan India sebanyak 3.462 orang. Selebihnya berasal dari Malaysia, Amerika Serikat, Thailand, Filipina, Australia, Inggris, yang totalnya mencapai 72 ribu orang.

Pandangan pragmatis ini pun tampak pada iklan tenaga kerja di Indonesia. Bukan saja TKA di Indonesia yang tidak memerlukan kemampuan berbahasa Indonesia, tetapi ironisnya tenaga kerja Indonesia di Indonesia pun tidak memerlukan syarat kemampuan berbahasa Indonesia. Tidak cukup sampai di situ ekspresi kegalauan, dan kita sampai pada pertanyaan, “Mengapa tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Indonesia memerlukan syarat kemampuan berbahasa asing, terutama bahasa Inggris?”

Dua gambaran mengenai pandangan pragmatis berkaitan dengan Bahasa Indonesia dan Nasionalisme tersebut hanya sebagian kecil yang teridentifikasi. Masih banyak persoalan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai jatidiri bangsa Indonesia sesuai dengan pasal 25 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2009. Sebagai contoh, pasal 28 UU Nomor 24 Tahun 2009, yang berbunyi: “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat Negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri”. Pasal ini tampaknya masih juga terbelenggu oleh pragmatisme; alasan kelancaran diplomasi. Di sisi lain, pasal 32 ayat (1) mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam forum internasional di Indonesia, yang hanya menjadi kepedulian sebagian kecil orang dalam segelintir forum. Tampaknya kata *wajib* kehilangan kekuatan semantisnya yang berfitur [+paksa],[-pilihan]. Jika dipaksa saja sudah diabaikan, apalagi pasal 32 ayat (2) yang mengandung frasa *dapat digunakan*; sudah tentu pilihan cenderung ke *tidak digunakan*.

Kongres, seminar, simposium tentang bahasa Indonesia telah diselenggarakan untuk mengumbar gagasan dan merumuskan kebijakan yang berpihak pada penguatan, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Hilgers-Hesse (1981:270), dalam Konferensi Asosiasi Bahasa-Bahasa Nasional ASEAN (*ASEAN Association on National Languages, ASANAL*), mengatakan bahwa bahasa Indonesia merupakan simbol kebanggaan nasional, simbol identitas nasional, sarana pemersatu berbagai perbedaan. Sarana pemersatu itulah yang menyebabkan diskusi tentang bahasa Indonesia sulit dipisahkan dari kemauan politik dari pemangku kebijakan.



PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA BERORIENTASI NASIONALISME

Kurikulum pada semua jenis dan jenjang pendidikan telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran atau mata kuliah. Jika dibongkar isinya, sesungguhnya sudah ideal. Akan tetapi, jika rumusan yang ideal itu dinihalkan oleh pendekatan yang kurang berpihak pada pembentukan sikap dan karakter nasionalisme. Beberapa kondisi dapat dipaparkan berikut ini.

- a. Pada jenjang pendidikan dasar, bahasa Indonesia cenderung diajarkan, bukan dibelajarkan. Padahal Kurikulum 2013 sudah menganut paradigma baru, dari belajar-mengajar menjadi pembelajaran. Pada sisi yang lain, sebagian besar pembelajar mengenal bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua (B2). Di sini terjadi persaingan struktur pada *langue* (istilah Saussure). Hampir semua guru SD kurang memiliki pengetahuan mengenai teori pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Singkatnya, bahasa Indonesia dan bahasa lokal berebut perhatian, baik dari guru maupun dari pembelajar.
- b. Pada jenjang pendidikan menengah, bahasa Indonesia dan bahasa asing (terutama bahasa Inggris) berebut perhatian. Struktur bahasa Indonesia yang dikuasai secara belum sempurna sudah dipaksa bersaing dengan struktur bahasa Inggris. Bahasa aglutinatif disandingkan dengan bahasa fleksi membawa kesulitan tersendiri bagi pembelajarnya. Belum lagi soal kedalaman materi akibat pemilahan bidang: IPA, IPS dan Bahasa.
- c. Pada jenjang pendidikan tinggi, bahasa Indonesia menjadi salah satu mata kuliah umum (MKU). Materi kuliah Bahasa Indonesia sebagai MKU sangatlah dangkal. Hal ini diperparah oleh kurangnya SDM sehingga dosen yang bukan berkeahlian bahasa pun tiba-tiba menjadi sangat percaya diri mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia.

Fakta ini berimplikasi pada luaran yang kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan berbahasa Indonesia yang memadai. Pertanyaannya, “Dapatkah seseorang bersikap positif terhadap bahasa Indonesia jika tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakannya?” Jawabannya berupa rentetan kondisi yang berbanding lurus. Tidak mengetahui, berarti tidak mampu menggunakan; tidak mampu menggunakan berarti tidak menyikapi secara benar/ positif; tidak menyikapi secara benar berarti keberadaannya tidak membanggakan, artinya tidak berkontribusi terhadap penguatan nasionalisme.

Ada banyak hal lain yang tidak termasuk dalam isi/ materi pembelajaran bahasa Indonesia yang sesungguhnya menjadi pencetus nasionalisme. Sebagai contoh, materi tentang keanekaragaman. Materi ini secara tidak langsung terkait dengan penguatan kedudukan bahasa Indonesia. Ketika pembelajar diperkenalkan konsep dan fakta keanekaragaman, hal-hal yang akan dibahas terkait dengan tiga hal, yakni: (1) bahasa daerah; (2) diglosia; (3) dan sikap terhadap bahasa. Ketiga hal tersebut dapat dielaborasi lagi menjadi kajian kontrastif antarstruktur yang memperkuat pengetahuan pembelajar tentang struktur fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik bahasa Indonesia.

Kridalaksana (1978:102) berpendapat bahwa salah satu tumpuan pengajaran bahasa Indonesia ialah sociolinguistik. Lebih lanjut ditekankan bahwa bahasa mempunyai banyak faset (segi) sehingga dalam pengajaran bahasa diupayakan agar anak (pembelajar) menguasai sebanyak-banyaknya faset itu. Pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya sebatas pada penguasaan bahasa yang baik dan benar. Hal senada dikemukakan pula oleh Sumardi (1996:208), bahwa struktur bahasa yang dibelajarkan kepada pembelajar tidak boleh dipisahkan dari konteks sosial budayanya.



KEGAGALAN DAN DISTORSI

Pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia belum berperan optimal di dalam menumbuhkan semangat nasionalisme. Hakikat dan esensi yang menjadi sasaran luaran pendidikan dan pengajaran Bahasa Indonesia dinegasikan oleh keinginan pragmatis. Hal ini tidak disebabkan oleh kekhilafan orientasi pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia. Sejumlah fakta dapat dikemukakan untuk meyakinkan diri kita sendiri bahwa pekerjaan besar masih menghadang terkait dengan upaya memperkuat nasionalisme melalui pendidikan bahasa Indonesia.

Kehidupan bahasa Indonesia dalam konteks nasionalisme ditentukan oleh faktor-faktor, sebagai berikut: (1) catatan historis terkait dengan peran bahasa Indonesia; (2) regulasi terkait dengan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia; (3) kebijakan bahasa terkait dengan kodifikasi dan penyebarluasan kaidah; dan (4) pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia terkait dengan peningkatan kompetensi; (5) kesadaran yang dilembagakan dalam kesearahan pikir dan tindak terkait dengan kesadaran dan penerapan kaidah bahasa Indonesia dalam penggunaan; dan (6) sikap bahasa para tokoh. Faktor-faktor tersebut berkontribusi sama terhadap sukses tidaknya mewujudkan bahasa Indonesia di dalam menumbuhkan dan memperkuat nasionalisme.

Realitas sehubungan dengan keenam faktor tersebut menunjukkan ketidakselarasan, baik yang terkait dengan lemahnya kesadaran terhadap kaidah, maupun penyimpangan atau distorsi terhadap berbagai regulasi. Di samping itu, ketidakseharahan secara kelembagaan dari seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan telah pula menambah kendala dalam menyelaraskan pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia dengan kesadaran kebangsaan atau nasionalisme.

Pertama, catatan historis yang penting untuk bahasa Indonesia ialah sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dari perspektif ini, bahasa Indonesia merupakan satu kesatuan dengan cita-cita berdirinya Bangsa Indonesia. Meskipun demikian seharusnya, namun peringatan/perayaan Sumpah Pemuda masih sebatas momen, bukan pada momentum. Momen Sumpah Pemuda yang dikemas dalam Bulan Bahasa dengan rentang waktu tertentu (Oktober) belum menjadi ‘gerakan menyeluruh’ untuk membangkitkan kesadaran akan pentingnya bahasa Indonesia bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya mengobarkan semangat nasionalisme.

Kedua, regulasi tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sesungguhnya sudah sangat kuat. UUD 1945 dan Amandemennya telah meningkatkan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan menjadi bahasa Negara. Pasal UUD 1945 tentang bahasa Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari seluruh pasal UUD 1945 sebagai syarat pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks ini, bahasa Indonesia semestinya sama penting dan sejajar dengan pasal UUD 1945 yang mengatur tentang Lembaga Negara, hak asasi manusia, dan lain-lain. Namun, kenyataannya masih “jauh panggang dari api”. Satu tingkat di bawah UUD 1945 terdapat UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan memperlihatkan ketidakonsistenan (dan ketidaksimetrisan) dalam rumusan sanksi pada Bab VII tentang Ketentuan Pidana. Pada bab ini tidak terdapat rumusan sanksi pada pasal 66 s.d pasal 71 hanya mengatur sanksi pidana untuk pelanggaran UU tentang bendera, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan.

Ketiga, kebijakan bahasa yang masih bersifat parsial dalam hal koordinasi antarlembaga, penyebarluasan kodifikasi yang belum menyeluruh, merupakan kendala serius bagi



peningkatan pengetahuan dan kesadaran norma bagi seluruh WNI. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai pemegang kendali operasionalisasi kebijakan bahasa di Indonesia masih berupa Badan yang berada di bawah satu kementerian, yakni Kemendikbud tidak memiliki kewenangan penuh untuk “memaksa” penerapan kaidah bahasa Indonesia di luar Kemendikbud. Bukankah nomenklatur garis komando dalam manajemen secara semiotik (ilmu tanda) memiliki “daya paksa/ tekan” ketimbang garis koordinasi yang hanya mengandalkan tenggang rasa? Tentang peningkatan status kelembagaan Pusat Bahasa telah direkomendasikan oleh Kongres Bahasa Indonesia VIII Tahun 2003, dan diperkuat dengan rekomendasi kongres IX Tahun 2008.

Implementasi kebijakan berupa Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) belum menunjukkan kebermaknaannya. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia IX Tahun 2008 mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan UKBI sebagai salah satu persyaratan dalam menduduki jabatan tertentu dan pengangkatan CPNS. Fakta menunjukkan bahwa UKBI saat ini hanya menjadi pekerjaan rutin Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa bersama Kantor Bahasa di semua provinsi di Indonesia. Hasil UKBI yang menggambarkan tingkat penerapan kaidah bahasa belum menjadi persyaratan penerimaan pegawai, penerimaan mahasiswa luar negeri, penerimaan mahasiswa dalam negeri, promosi jabatan, penerimaan pengajar BIPA, penerimaan guru bahasa Indonesia, dan lain-lain yang dipandang relevan di dalam penyebarluasan kaidah bahasa Indonesia secara masif dan sistematis.

Keempat, Pendidikan dan Pengajaran Bahasa Indonesia pada semua jenis dan jenjang pendidikan masih memerlukan pembenahan dalam hal kurikulum (pendekatan dan isi/ muatan) dan sumber daya manusia (tenaga pendidik). Kurikulum Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP dan STKIP harus berorientasi pada penguatan kompetensi keilmuan calon guru bahasa Indonesia dengan tingkat kemampuan ‘mahir’, di samping kompetensi paedagogiknya. Demikian pula luaran pembelajaran bahasa Indonesia harus mempertimbangkan keseimbangan antara pengetahuan kebahasaan, keterampilan berbahasa, dan sikap terhadap bahasa Indonesia. Sementara itu, pelatihan peningkatan kompetensi guru dan dosen bahasa Indonesia harus diletakkan dalam bingkai Penguatan nasionalisme.

Kelima, kesadaran akan kesearahan pikir dan tindak dalam penerapan kaidah bahasa dan kaidah penggunaan bahasa Indonesia melibatkan unsur-unsur, lembaga, perorangan, dan masyarakat yang tidak terkait langsung atau berurusan dengan bahasa Indonesia, termasuk lembaga pendidikan formal dan nonformal yang berurusan dengan bahasa asing. Dengan demikian, berkulah prinsip “Satu Kaidah Bahasa Indonesia untuk Semua”. Kaidah bahasa Indonesia yang dihasilkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menjadi rujukan dan diterapkan oleh seluruh WNI secara perorangan dan secara kelembagaan. Dengan demikian sangat diperlukan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyebarluasan hal ihwal bahasa Indonesia.

Keenam, sikap bahasa para tokoh dalam masyarakat paternalistik turut menentukan kesadaran dan ketaatan terhadap berbagai norma, termasuk norma bahasa. Jika UKBI belum optimal memberi makna terhadap petingnya bahasa Indonesia dalam penguatan nasionalisme, mungkin UKBI mengikutsertakan para tokoh untuk keperluan pemetaan mengenai kesadaran norma bahasa Indonesia? Jika para tokoh “dipaksa” menjadi rujukan yang layak dirujuk kemahiran berbahasa Indonesianya, maka momentum untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai identitas keindonesiaan dalam memperkuat nasionalisme menjadi sebuah keniscayaan.



PENUTUP

Hal yang didiskusikan dalam makalah ini mengantarkan kita ke suatu pemahaman komprehensif tentang kehidupan bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, juga sebagai jati diri dan identitas bersama, perjuangan untuk menjadikannya sebagai bahasa yang bermartabat harus terus dilakukan. Apalagi rencana jangka menengah oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa Internasional.

Perjuangan untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional bukan sekedar meyakinkan bangsa lain tentang fungsinya sebagai bahasa ilmu pengetahuan yang mumpuni. Seluruh warga negara Indonesia harus lebih dahulu menyadari norma bahasa Indonesia, mencintai bahasa Indonesia, bangga terhadap bahasa Indonesia, agar kemudian kita dapat meyakinkan bangsa lain ihwal kemampuan bahasa Indonesia menjadi sarana komunikasi internasional. Di samping itu, diperlukan upaya sungguh-sungguh menaati regulasi, konsisten terhadap prinsip nasionalisme keindonesiaan melalui bahasa Indonesia, sambil secara sistematis merumuskan kodifikasi yang memungkinkan bahasa Indonesia mudah dipelajari.

Untuk mendukung kebijakan bahasa, pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia harus dirancang secara terpadu. Strategi, pendekatan, metode, dan muatan materi pembelajaran bahasa Indonesia berorientasi pada luaran yang memiliki pengetahuan ketatabahasaan bahasa Indonesia yang memadai, keterampilan berbahasa Indonesia yang mantap, dan sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Dengan baku mutu luaran yang demikian dapat menumbuhkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia sebagai identitas bersama, yang bermuara pada penguatan nasionalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan. 2011. *Bahasa Indonesia, Pemakai dan Pemakaiannya*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Amanriza, Ediruslan Pe. 2001. "Sumbangan Riau terhadap Pemerdayaan Bahasa Indonesia, Sebuah Tinjauan Awal", dalam Dendy Sugono dan Abdul Rozak Zaidan (ed.), *Bahasa Daerah dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2011. *Kumpulan Putusan Kongres Bahasa Indonesia I—IX Tahun 1938—2008*. Jakarta.
- Brown, H. Douglas. 2008. *Prinsip Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa* (Edisi Kelima). Terjemahan Noor Cholis dan Yusi Avianto Pareanom. Jakarta: Kedutaan Besar Amerika Serikat.
- Hilgers-Hesse, Irene. 1981. "Bahasa Indonesia as An Indicator of National Development", dalam Amran Halim (Ed.), *Bahasa dan Pembangunan Bangsa*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departmen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kridalaksana, Harimurti. 1978. *Fungsi Bahasa dan Sikap Bahasa*. Ende: Penerbit Nusa Indah.
- Ola, Simon Sabon. 2010. *Sosiolinguistik*. Yogyakarta: The Dogge Press.



- Sumardi, Mulyanto. 1996. "Pengajaran Bahasa Indonesia di Sekolah: Gramatika atau Komunikasi?", dalam Mulyanto Sumardi, *Barbagai Pendekatan dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- <https://www.cnnindonesia.com>. Diunggah 31 Agustus 2015. "Syarat Bahasa bagi Pekerja Asing Dihapus, RI Dukung Investor"
- <https://www.antara.news.com>. Diunggah 18 juni 2014. "Bahasa Indonesia Ditargetkan Jadi Bahasa Internasional ke-7".

